



2022

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Diterbitkan oleh :
Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang
Tahun 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dapat tersusun secara tuntas sebagaimana mestinya. Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Permenpan & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

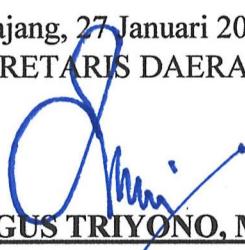
Secara garis besar capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 relatif tercapai, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Bahwa dari 8 indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam SK Bupati No. 188.45/196/427.12/2022, terdapat :
 - a. 2 indikator tercapai maksimal ($\geq 100\%$);
 - b. 1 indikator tercapai sesuai dengan target;
 - c. 5 indikator belum tercapai secara maksimal (rentang capaian antara 96 % - 99,24 %).
2. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU secara garis besar sebagai berikut :
 - a. Adanya beberapa kebijakan yang baru diterapkan memerlukan beberapa penyesuaian;
 - b. Minimnya koordinasi dan komunikasi serta penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) antara pihak penyelenggara dengan penerima pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah.

Adapun penjabaran atas capaian IKU lebih rinci tersaji dalam Bab III dokumen ini.

Penyusunan dokumen laporan kinerja ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karenanya kami sampaikan terima kasih kepada seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan pihak lainnya yang telah memberikan kontribusi sehingga dalam penyusunan Laporan Kinerja dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kinerja kedepannya.

Lumajang, 27 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH


Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Gambaran Umum	3
1.4 Dasar Hukum	4
1.5 Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 Perencanaan Strategis	7
2.2 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	12
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	14
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas kinerja dan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

Kedudukan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, untuk selanjutnya disingkat Setda, merupakan unsur staf pendukung Bupati dan/atau Wakil Bupati yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya yang terbagi pada bagian-bagian yang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021, didukung dengan pegawai sebanyak 82 orang PNS, 1 CPNS dan 144 orang TKB yang terbagi ke dalam 8 Bagian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2022
PNS

NO.	OPD	STATUS KEPEGAWAIAN			GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN						
		PNS	CPNS	TKB	I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	D I	D III	S1	S2
1	Bagian Tata Pemerintahan	4	-	6	-	2	2	-	-	-	5	-	1	3	1
2	Bagian Hukum	5	-	8	-	1	4	-	-	-	1	-	-	11	1
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	-	8	-	2	3	1	-	-	5	-	-	8	1
4	Bagian Perekonomian dan SDA	5	-	3	-	2	2	1	-	-	3	-	-	4	1
5	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	12	-	9	1	1	9	1	-	1	3	1	2	14	-
6	Bagian Organisasi	6	-	7	-	2	3	1	-	-	2	-	2	8	1
7	Bagian Protokol dan TU Pimpinan	15	1	48	-	7	8	1	1	2	24	1	3	32	1
8	Bagian Umum	29	-	55	6	13	6	1	5	6	40	-	2	25	3
Jumlah		82	1	144	7	30	37	6	6	9	83	2	10	105	9

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai pada Sekretariat Daerah dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan S1 dengan jumlah 105 orang, SMA dengan jumlah 83 orang, DIII dengan jumlah 10 orang, DIII dengan jumlah 10 orang, SMP dan S2 dengan jumlah 9 orang, dan SD dengan jumlah 6 orang dan DI dengan jumlah 2 orang.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang III sebanyak 37 orang, golongan ruang II sebanyak 30 orang, golongan I sebanyak 7 orang dan golongan ruang IV sebanyak 6 orang, dengan demikian Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III.

1.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. GAMBARAN UMUM

Pembentukan Sekretariat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pendukung Bupati dan/atau Wakil Bupati yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 Tahun 2021. Adapun fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah antara lain :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten;

- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022, dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang;
17. Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/196/427.12/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022.

1.5. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)
TAHUN 2019– 2023
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Lumajang.

2.1.1. TUJUAN

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam kerangka rencana strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2019 – 2023 menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya Nilai SAKIP.

2.1.2. SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Kerumahtanggan;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Keprotokolan;
3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Tata Pemerintahan;
5. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Perekonomian;
6. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Kesejahteraan Rakyat;
7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; dan
8. Meningkatnya Kualitas Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 2.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kepuasan Masyarakat di pelayanan Kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kerumahtanggaan
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di pelayanan Keprotokolan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Keprotokolan
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Tata Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Tata Pemerintahan
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perekonomian
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa
Meningkatnya Nilai SAKIP	Meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan	Persentase kebijakan yang mendukung penyelarasan regulasi, penyederhanaan prosedur, dan menjawab kebutuhan masyarakat
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.1.3. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang serta dengan instansi pemerintah vertikal lainnya;
2. Memastikan setiap produk hukum daerah patuh terhadap prosedur, sesuai dengan substansi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
3. Meningkatkan fasilitasi bantuan hukum terhadap aparatur dan masyarakat miskin;
4. Meningkatkan upaya penyelenggaraan penyuluhan hukum dan produk hukum daerah;
5. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan dengan pihak terkait;
6. Optimalisasi pelayanan informasi bidang energi dan sumber daya alam, data perekonomian, penanaman modal dan investasi;
7. Pengelolaan data administrasi pembangunan dari OPD sesuai dengan ketentuan;
8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan serta kualitas pejabat pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah;
9. Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah;
10. Meningkatkan publikasi tentang hasil pembangunan;
11. Meningkatkan kualitas keprotokolan dalam pelayanan kedinasan kepada Bupati/Wakil Bupati;
12. Peningkatan kualitas pelayanan kedinasan dan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan bagi PPTK dan pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
14. Meningkatkan pembinaan secara berkala terhadap PNS di lingkungan Sekretariat Daerah;
15. Mengoptimalkan penerapan SAKIP oleh seluruh OPD melalui keberadaan dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja,

pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja serta pelaksanaan evaluasi internal.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat Daerah, sebagaimana pada Lampiran II

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022.

Penyusunan indikator sasaran pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah tahun 2022, mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/196/427.12/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Organisasi Perangkat Daerah, yakni terdapat 8 sasaran dengan jumlah total 8 indikator. Bahwa enam (6) dari delapan (8) IKU Setda adalah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana penilaian atas IKM didasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 yang dilakukan secara mandiri oleh instansi terkait. IKM merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

Berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan berbasis anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2022, dapat dilihat capaian IKU Setda pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian IKU Setda tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Tata Pemerintahan	85	85,84	100,99%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	89	88,32	99,24%
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perekonomian	90	87,47	97%
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	86	89,07	103,56%
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Keprotokolan	86,5	83,34	96%
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kerumah tanggaan	89	86,13	96,8%
7.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
8.	Persentase kebijakan yang mendukung penyelarasan regulasi, penyederhanaan prosedur, dan menjawab kebutuhan masyarakat	96	94,635	98,5%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 8 indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Tahun 2022, dapat dilihat bahwa terdapat 3 indikator yang memenuhi target, sedangkan 5 indikator belum tercapai maksimal. Adapun rincian indikator tersebut dapat dilihat pada sub bab 3.2 evaluasi dan analisis capaian kinerja.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Tata Pemerintahan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Tata Pemerintahan	Nilai	85	85,84	100,99
Rata-rata Capaian				100,99

Pada tahun 2022 indikator nilai IKM pada pelayanan Tata Pemerintahan telah mencapai target, yaitu dengan capaian sebesar 100,99 %.

Adapun faktor pendukung hingga pelayanan Tata Pemerintahan dapat berjalan dengan baik karena adanya evaluasi kerjasama secara berkala untuk mengetahui MOU yang akan berakhir maupun yang sudah berakhir.

Keberhasilan Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tupoksi ini tidak lepas dari kendala yang dihadapi di lapangan. Adapun kendala/hambatan yang dialami seperti kurang sesuainya syarat dengan ketentuan yang dipublikasikan oleh petugas.

Upaya untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan dan pendampingan terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar sesuai dengan ketentuan untuk menunjang kinerja pelayanan.

.Pencapaian sasaran tersebut didukung dengan 1 program teknis dan 1 program rutin, dengan pagu anggaran Rp. 795.635.698,- dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	242.845.400,00	240.465.004,00	99,02
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	552.790.298,00	543.061.172,00	98,24
Jumlah	795.635.698,00	783.526.176,00	98,48

- Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Kesejahteraan Rakyat

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	89	88,32	99,24%
Rata-rata Capaian				99,24%

Pada tahun 2022 realisasi nilai IKM di pelayanan Kesejahteraan Rakyat sebesar 88,32 nilai tersebut belum mencapai target, karena terjadinya adanya beberapa Lembaga yang mengajukan usulan hibah namun tidak mampu untuk memenuhi persyaratan administrasi.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan kerjasama yang baik antara bagian kesra dengan stakeholder dan instansi yang menjadi mitra kerja seperti Kemenag, PCNU, PD Muhammadyah, BAZNAS, MUI, dan berbagai ormas keagamaan lainnya.

Pencapaian indikator tersebut didukung 1 program teknis dan 1 program rutin, dengan pagu anggaran sebesar Rp 46,702,358,900,- dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	270.666.500	260.535.882	96,26
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	46.431.692.400	45.336.191.600	97,64
Jumlah	46,702,358,900	45.596.727.482	97,63

- Sasaran 3 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Perekonomian

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Perekonomian	Nilai	90	87,47	97%
Rata-rata Capaian				97%

Pada tahun 2022 realisasi nilai IKM di bidang perekonomian sebesar 87,47, nilai tersebut belum mencapai target, karena terjadinya perubahan harga kebutuhan pokok

yang naik turun sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat yang mengakibatkan terjadinya inflasi.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut dengan melakukan koordinasi dan monitoring bersama OPD terkait untuk meningkatkan inflasi.

Pencapaian indikator tersebut didukung 1 program teknis dan 1 program rutin, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 858.079.520,- dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	223.032.750	207.040.779	92,83
Program Perekonomian dan Pembangunan	635.046.770	622.373.390	98,00
Jumlah	858.079.520	829.414.169	96,66

- Sasaran 4 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	86	89,07	103,56%
Rata-rata Capaian				103,56%

Pada tahun 2022 indikator nilai IKM pada pelayanan pengadaan barang/jasa telah mencapai target, yaitu dengan capaian sebesar 103,56 %.

Adapun faktor pendukung hingga pelayanan pengadaan Barang dan Jasa dapat berjalan dengan baik karena adanya kebijakan dari Presiden RI melalui Inpres 2 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, meningkatkan jumlah pengguna layanan/responden yang memanfaatkan layanan LPSE untuk berkoordinasi terkait hal tersebut.

Keberhasilan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tupoksi ini tidak lepas dari kendala yang dihadapi di lapangan. Adapun kendala/hambatan yang dialami seperti keterbatasan kemampuan personil dalam pengoperasian sistem/aplikasi belum memadai.

Untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan terkait P3DN dan E-Katalog lokal serta membuka layanan konsultasi online (daring) maupun offline (tatap muka).

Pencapaian indikator tersebut didukung dengan 1 program teknis dan 1 program rutin dengan pagu anggaran sebesar Rp. 464.919.850,- dan realisasi sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	213.086.400	212.094.535	99,53
Program Perekonomian dan Pembangunan	251.833.450	245.404.097	97,45
Jumlah	464.919.850	457.498.632	98,40

➤ Sasaran 5 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Keprotokolan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Keprotokolan	Nilai	86,5	83,34	96%
Rata-rata Capaian			96%	

Pada tahun 2022 indikator atas target kinerja indeks kepuasan masyarakat di pelayanan keprotokolan sebesar 83,34. Adapun kendala/hambatan dalam pencapaian indikator kinerja diantaranya :

1. Perbedaan peraturan dan pemahaman terkait keprotokolan antara protokoler dengan berbagai instansi lain;
2. Acara yang mengundang pimpinan kadang-kadang diadakan mendadak dan tanpa berkoordinasi dengan protokoler terlebih dahulu; dan
3. Surat dari OPD yang dikirimkan ke TU belum sesuai ketentuan.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan diantaranya :

1. Melaksanakan acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Protokoler berinisiatif melaksanakan koordinasi dengan penyelenggaraan acara atau mendahului ke lokasi acara; dan

- Petugas yang menangani surat langsung mengarahkan pihak yang mengajukan surat agar membenahi surat sesuai ketentuan.

Pencapaian indikator tersebut didukung dengan 1 program rutin, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.678.111.070,- dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.678.111.070	6.528.882.667	97,77
Jumlah	6.678.111.070	6.528.882.667	97,77

- Sasaran 6 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Kerumahtanganan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kerumahtanggaan	Nilai	89	86,13	96,8%
Rata-rata Capaian			96,8%	

Pada tahun 2022 realisasi nilai IKM di pelayanan kerumahtanggaan sebesar 86,13. Nilai IKM tersebut merupakan hasil survei kepuasan masyarakat pada semua pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum. Sedangkan nilai IKM khusus pelayanan jamuan kerumahtanggaan pimpinan memperoleh nilai IKM 85,4. Nilai IKM pelayanan kerumahtanggaan belum mencapai target dikarenakan adanya kendala :

- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seringkali bersinggungan dengan tugas dan fungsi pada Bagian Umum, terutama dalam pelayanan tamu pimpinan;
- Acara yang melibatkan pimpinan kadang-kadang diadakan mendadak bahkan kurang koordinasi dengan bagian umum terkait penyiapan jamuan sebagai penyedia fasilitasi jamuan pimpinan;
- Beberapa kegiatan terlaksana berdasarkan kegiatan pimpinan seperti pengadaan cinderamata (batik) dan fasilitasi jamuan tamu dinas maupun rumah tangga pimpinan.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan antara lain :

- Senantiasa mengedepankan standar dan maklumat pelayanan yang didukung dengan komitmen terhadap pemenuhan pakta integritas, sehingga fasilitasi pendampingan

kegiatan protokoler pimpinan dan penyediaan kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi dengan baik;

2. Melakukan fungsi koordinasi lebih awal agar dapat maksimal dalam pelayanan pimpinan;
3. Mencatat kalender kegiatan pimpinan (untuk acara rutin besar) untuk memprediksi kebutuhan fasilitasi jamuan tamu pimpinan maupun terkait dengan pengadaan cinderamata.

Pencapaian indikator tersebut didukung dengan 1 program rutin, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.649.921.984,- dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.649.921.984	20.038.526.635	97,04
Jumlah	20.649.921.984	20.038.526.635	97,04

➤ Sasaran 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	100	100	100
Rata-rata Capaian				100

Pada tahun 2022 indikator nilai SAKIP telah mencapai target, yaitu dengan realisasi capaian sebesar 100%, adapun pencapaian target telah mencapai 100% namun tidak terlepas dari kendala / hambatan antara lain :

1. Kurangnya komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan SAKIP;
2. Kurangnya pemahaman pimpinan dalam penyelenggaraan SAKIP;
3. Masih adanya perbedaan pemahaman terkait SAKIP antar OPD/UK;
4. Adanya kecenderungan memasrahkan pekerjaan SAKIP pada satu/dua orang saja;
5. Beberapa OPD yang nilai SAKIP-nya bagus masih berorientasi pada "nilai" bukan proses.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala / hambatan antara lain :

1. Melibatkan dan menghadirkan pimpinan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan SAKIP;
2. Mengundang narasumber dari Kementerian PAN & RB guna pembinaan SAKIP;
3. Melakukan rapat koordinasi secara maraton menjelang pelaksanaan evaluasi SAKIP antar OPD yang terkait dengan penyelenggaraan SAKIP.

Pencapaian indikator tersebut didukung dengan 1 program rutin, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 339.070.750,- dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	339.070.750	327.925.426	96,71
Jumlah	339.070.750	327.925.426	96,71

➤ Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase kebijakan yang mendukung penyelarasan regulasi, penyederhanaan prosedur, dan menjawab kebutuhan masyarakat	%	96	94,635	98,5%
Rata-rata Capaian				98,5%

Pada tahun 2022 realisasi nilai SAKIP di bidang hukum sebesar 94,635, nilai tersebut tidak mencapai target dikarenakan adanya kendala kurangnya kepatuhan terhadap prosedur pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan/kendala yakni :

1. Melakukan koordinasi kepada Perangkat Daerah terkait Pembentukan Produk Hukum;
2. Melakukan percepatan dan peningkatan kualitas Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pencapaian indikator tersebut didukung 1 program teknis dan 1 program rutin, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 649.200.216,- dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	353.140.356	347.298.368	98.35
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	296.059.860	286.818.150	96.88
Jumlah	649.200.216	634.116.518	97.68

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 sebagaimana diuraikan pada BAB III, dapat dikatakan relatif tercapai, meskipun dalam hal ini angka realisasinya tidak seluruhnya berada pada angka 100%. Hasil evaluasi pelaksanaan di tahun 2022 terdapat beberapa kendala baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Salah satunya yaitu adanya beberapa prosedur pelayanan (standar pelayanan) yang belum dipahami oleh penerima layanan. Selain itu adanya beberapa kebijakan yang baru diterapkan memerlukan beberapa penyesuaian. Namun, dengan adanya keterbatasan tersebut tidak menjadi penghalang untuk terus berupaya dan berkomitmen serta berbenah dalam meningkatkan kinerja agar target yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik serta memberikan manfaat dan dampak yang positif kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini, kiranya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Lumajang, 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH



Drs. AGUS TRIYONO, M.Si

NIP. 19690507 198903 1 004

LAMPIRAN I

P-RENSTRA 2019-2023

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yang disesuaikan dengan P-RPJMD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	Sekretariat Daerah
1.Meningkatnya Kepuasan Masyarakat					81,33			81,5		82		82,5		83		83			
2.Meningkatnya Nilai SAKIP					B			B		BB		BB		A		A			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaihan pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 2019						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	Sekretariat Daerah			
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di pelayanan kerumahannya	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88	89	Rp24.571.359,229	90	90	Rp72.678.110,649	Rp94.680.400	Rp10.650.000					
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di pelayanan Keprotokolan	4.01.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	Rp30.291.750	100	100	Rp38.291.150	Rp3.470.000						
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di pelayanan Pengadaan Barang /Jasa	4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	4 dokumen	Rp3.710.000	12 Dokumen	12 Dokumen								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di pelayanan Tata Pemerintahan	4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	Rp7.972.000	Rp7.108.000	Rp15.108.000	3 Dokumen	Rp30.188.000	Rp19.048.400	Rp8.148.000		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di pelayanan Perekonomian	4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen	Rp4.990.000	Rp7.029.500	Rp7.028.900	6 dokumen	Rp19.048.400	Rp8.148.000	Rp8.148.000		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	Rp2.315.000	Rp2.916.500	Rp2.916.500	3 dokumen	Rp19.048.400	Rp8.148.000	Rp8.148.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen		Rp2.916.500	Rp2.916.500	3 dokumen		Rp8.148.000	Rp9.081.500				
	Meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan	4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	5 laporan		Rp3.439.250	Rp3.439.250	15 laporan		Rp9.416.500					
		4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	24 laporan		Rp2.592.500	Rp3.412.000	72 laporan							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lo kasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20			
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100			Rp8.796.128.557			Rp26.632.846.175	Rp26.097.186.810	Rp504.803.365			
		4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	93 orang/12 bulan		Rp9.031.487.661	Rp8.805.229.957		100	100	100	100	92 orang/12 bulan	92 orang/36 bulan	
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen		Rp8.891.470.096	Rp8.610.336.757		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20			
		4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokument	12 dokument	12 dokument	12 dokument	12 dokument	12 dokument	36 dokument	Rp8.801.000	Rp22.055.000			
		4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	18 laporan	Rp6.136.000	Rp6.783.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023						
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20		
		4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Fasilitasi BMD Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100		Rp7.902.000		100	100	100	Rp31.260.000	Rp8.757.000	Rp9.720.000	Rp8.847.000
		4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen		Rp15.456.000	Rp7.902.000	100	2 Dokumen	6 Dokumen				
		4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen		Rp2.145.000	Rp3.306.000	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen				
		4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Laporan		Rp9.720.000	Rp0	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan				
												Rp2.175.000	Rp3.336.000							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	Rp1.416.000	Rp1.260.000	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	Rp3.936.000	Rp1.473.742.788	Rp453.619.788	
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Rp726.362.788	Rp367.865.000	100	100	100	Rp379.515.000	Rp95.515.000		
		4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	2 paket	Rp272.739.788	Rp85.365.000	1 paket	15 paket	18 paket				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20			
		4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	0 orang		2000 orang	Rp284.000.000	4000 orang			Rp1.020.123.000	Rp9.086.444.160	Rp163.865.808		
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100		100	Rp3.121.321.111	100	100	100	Rp3.107.527.921	Rp52.184.819			
		4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Paket		2 Paket	Rp59.421.520	3 Paket	6 Paket		Rp52.259.469				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20			
		4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Paket	0 Paket	Rp13.000.000	2 Paket	Rp21.479.174	Rp1.719.552.279	Rp539.132.105					
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	27 Paket	32 Paket	Rp584.125.942	93 Paket	Rp586.839.624	Rp158.247.350						
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	8 Paket	13 Paket	Rp167.442.000	34 Paket	Rp213.442.755	Rp1.719.552.279	Rp539.132.105					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	25 Dokumen	36 Dokumen	37 Dokumen	Rp54.355.000	Rp56.080.350	98 Dokumen	Rp167.245.049	Rp151.286.617	Rp2.865.140.592	
		4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Paket	4 Paket	4 Paket	Rp51.330.200	Rp51.255.550	11 Paket	Rp1.011.917.850	Rp2.865.140.592		
		4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	49 Laporan	61 Laporan	61 Laporan	Rp1.011.992.500	Rp841.230.242	171 Laporan	Rp1.011.917.850	Rp2.865.140.592		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20			
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	74 Laporan	95 Laporan	Rp1.178.002.378	Rp1.985.816.089	Rp3.458.742.536	Rp216.021.300	Rp450.834.893					
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	Rp1.080.924.158	Rp758.187.510	Rp735.009.459	100	5 unit					
		4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Unit	0 Unit	Rp492.619.120	Rp216.021.300	Rp254.485.660	0 Unit	5 unit					
		4.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	0 Unit	1 Unit	Rp0		Rp196.349.233	0 Unit	1 unit					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20			
		4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Unit	33 Unit	Rp503,701,850	20 Unit	55 unit	Rp1,318,959,896	Rp11.585.849.780	Rp313.317.481				
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	Rp3.848.343.200	100	100	Rp3.838.052.100	Rp3.848.343.200	Rp3.838.052.100				
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan	Rp88.074.000	12 Laporan	36 Laporan	Rp92.459.350	Rp88.074.000	Rp92.459.350				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	Rp1.168.048.404	Rp1.400.830.800	12 Laporan	36 Laporan	Rp3.961.569.654	Rp485.511.634	Rp6.825.451.012	Rp8.605.311.704	
		4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	Rp151.257.084	Rp163.539.600	24 Laporan	61 Laporan	Rp170.714.950	Rp170.714.950	Rp2.182.187.350	Rp3.029.648.564	
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	66 Laporan	Rp2.447.364.862	Rp2.195.898.800	87 Laporan	239 Laporan	86 Laporan	100	100	100	
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Rp2.580.387.867	Rp2.995.275.273							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20			
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Unit			Rp358.000.000	30 Unit		Rp1.097.062.964	Rp4.132.034.205	Rp227.780.359	Rp791.536.950		
		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	77 Unit			Rp1.462.171.800	221 Unit		Rp383.000.000	Rp1.471.697.150	Rp45.000.000	Rp273.934.591		
		4.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara	0 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Unit			Rp41.950.000	40 Unit		Rp1.198.165.255	Rp140.830.359	Rp45.000.000	Rp273.934.591		
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	348 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	233 Unit			Rp243.590.359	742 Unit		Rp274.012.000	Rp274.012.000	Rp274.012.000	Rp274.012.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20			
		4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	6 Unit	6 Unit	18 Unit	Rp901.016.823	Rp2.584.677.584	Rp4.550.720.273	Rp2.306.648.043	Rp64.987.230				
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan dan operasional Bupati dan Wabup	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	Rp1.507.740.370	Rp901.091.473	Rp1.507.740.370	Rp769.486.960	Rp21.662.410				
		4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	2 orang/bulan	2 orang/bulan	2 orang/36 Bulan	Rp767.674.123	Rp769.486.960	Rp21.662.410	Rp21.662.410	Rp21.662.410				
		4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 paket	1 paket	1 paket	Rp21.662.410	Rp21.662.410	Rp21.662.410	Rp21.662.410	Rp21.662.410				

Bagian Protokol dan TU Pimpinan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20			
		4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	8 orang	8 orang	Rp40.000.000	Rp40.000.000	24 orang		Rp120.000.000	Rp2.059.085.000		Bagian Umum		
		4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	2 orang/bulan	2 orang/bulan	Rp676.591.000	Rp676.591.000	6 orang/bulan		Rp1.735.940.708	Rp4.576.337.221				
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	Rp1.104.231.855	Rp1.104.231.855	100		Rp1.736.164.658					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	45 paket	Rp948.898.676	Rp2.565.048.656	Rp1.843.437.269	Rp372.518.000	Rp143.472.000
		4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	45 paket	Rp728.261.712	Rp667.176.654	Rp728.336.362	Rp58.780.320	Rp124.839.000
		4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	15 paket	Rp386.839.195	Rp50.216.006	Rp58.854.970	Rp148.324.000	Rp49.643.000
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase OPD yang difasilitasi penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja dan tata laksana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	Rp99.355.000	Rp148.324.000	Rp49.643.000	100	3 Dokumen
		4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp44.186.000	Rp49.643.000	Rp44.186.000	1 Dokumen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capai an pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peragk at daerah Penang gung Jawab	Lo kas i		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerj a	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Laporan	Rp31,408,000	Rp66.485.000	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	Rp140.893.000	Rp88.153.000	Rp23.000.000	
		4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	Rp23.761,000	Rp32.196.000	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	Rp43.000.000	Rp32.196.000	Rp23.000.000	
		4.01.01.2.13.04	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	0 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	0 Dokumen	Rp 0		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capai an pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peragkat daerah Penanggung Jawab	Lo kas i		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerj a	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20			
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	24 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	24 lapor an		24 laporan	Rp1.298.204.000	72 laporan		Rp3.935.994.200	Rp2.714.994.200	Rp1.221.000.000			
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 lapor an		12 laporan	Rp915.704.000	36 laporan		Rp883.586.200	Rp915.704.000	Rp382.500.000			
		4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 lapor an		12 laporan	Rp456.000.000	36 laporan		Rp382.500.000	Rp456.000.000	Rp382.500.000			

Bagian Protokol dan TU Pimpinan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %							Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesra, Bagian Hukum	Bagian Tata Pemerintahan	
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %							Rp121,045,598,956	Rp1,256,630,703	Rp382.578.685
		4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	0 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	4 dokumen							Rp45.180.881.631	Rp608,115,000	Rp171,061,000
																Rp34.317.922.492	Rp40,400,703	Rp40,400,703	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokument	1 dokument	2 dokument				Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	0 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	0 dokument	4 dokument	0 Dokumen	4 dokument	4 dokument					
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	Rp34,317,922,492	Rp39,476,454,516	Rp43,504,846,468	Rp117,299,223,476	
															Rp1,319,467,000	Rp874.108.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaihan pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	14 dokumen	Rp20,670,984,024	12 dokumen	Rp26,068,270,516	12 dokumen	Rp30,096,662,468	38 dokumen	Rp76,835,917,008		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	0 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	Rp13,389,868,468	Rp13,286,604,000	Rp13,286,604,000	3 dokumen	Rp39,963,076,468				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	0 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	3 dokumen	Rp121,580,000	8 dokumen	Rp2.066.474.777	Rp500,230,000	Bagian Hukum			
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2%	2%	Rp789.609.239	2%	Rp408.295.375	Rp868.570.163				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	Bagian Tata Pemerintahan			
		4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	15 Kasus	15 Kasus				
		4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen				
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Rp199.350.000	Rp199.350.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 doku men	12 dokumen	Rp199.350.000	Rp199.350.000	Rp.6.000.000	Rp12.000.000	Rp423.250.000	Bagian BPBJ dan Perekonomian		
		4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N / A	1 laporan	Rp.6.000.000	Rp.6.000.000	Rp14,912,702,570	Rp12.000.000	Rp43,999,125,480		
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Angka Inflasi daerah	2,35	N/A	N/A	N/A	N/A	2,35		Rp14,173,720,340		2,35	2,35	2,35			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 2019						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	Bagian Sumber daya dan Ekonomi			
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 kebijakan	10 kebijakan	30 kebijakan	Rp2,979,694,000	Rp25,248,000	Rp8,670,490,865	Rp43,000,000	Rp8,738,738,865					
		4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 dokumen	5 dokumen	15 dokumen	Rp2,893,720,125	Rp2,520,000	Rp21,494,000	Rp2,924,200,000	Rp34,000,000					
		4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	3 laporan	7 laporan	Rp2,865,324,740	Rp1,234,000	Rp2,882,200,125	Rp9,000,000	Rp2,864,090,740					
		4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0 Dokumen	0 Dokumen	1 dokumen	Rp0									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Presentase pencapaian pelaksanaan administrasi pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	Rp0	100	100	100	Rp11.400.000	Rp11.400.000	Rp826,008,155	Rp224,343,698	
		4.01.03.2.02.01	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0 laporan	Rp0	2 laporan	2 laporan	4 laporan	Rp5.700.000	Rp5.700.000	Rp278,124,249	Rp84,741,849	
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai aturan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Rp269,759,657	100	100	100	Rp278,124,249	Rp84,741,849	Rp224,343,698		
		4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	115 Dokumen	Rp54,865,000	100 Dokumen	100 Dokumen	315 Dokumen					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	Rp208,970,000	Rp99,833,600	12 Dokumen	36 Dokumen		Rp408,637,200	Rp193,022,257	Bagian Sumber Daya dan Ekonomi	
		4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	180 Orang	Rp5,924,657	Rp93,548,800	180 Orang	540 Orang		Rp12,356,206,917	Rp35,135,701,056		
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan Sumber Daya Alam yang dilakukan pemantauan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 kebijakan	Rp11,038,635,943	Rp11,740,858,196	3 kebijakan	9 kebijakan					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	Rp11,036,021,850	Rp33,107,165,943		
		4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	Rp3,513,750	Rp10,541,200		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan/atau Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan/atau Indikator Kegiatan	Data Capai a n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peragk at daerah Penang gung Jawab	Lo kas i		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerj a	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
		4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0 kebijakan	Rp0	1 kebijakan	Rp701,322,596	1 kebijakan	Rp701,322,596	2 kebijakan	Rp1,402,645,192		

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2022



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Daerah Kab. Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. THORIQUL HAQ, M.ML**
Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, November 2022

PIHAK KEDUA

H. THORIQUL HAQ, M.ML

PIHAK PERTAMA

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

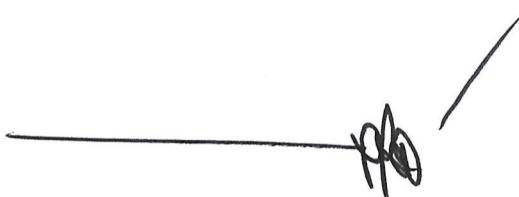
LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DAERAH KAB. LUMAJANG

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di pelayanan kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kerumahtanggaan	89
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di pelayanan Keprotokolan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Keprotokolan	86,5
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di pelayanan Pengadaan Barang /Jasa	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadaan Barang /Jasa	86
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di pelayanan Tata Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Tata Pemerintahan	85
5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di pelayanan Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan perekonomian	90
6	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	89
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100
8	Meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan	Persentase Kebijakan yang mendukung penyelarasan regulasi, penyederhanaan prosedur, dan menjawab kebutuhan masyarakat	96
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	89
2	Meningkatnya fasilitasi kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	97%
3	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi perekonomian dan pembangunan	Angka Inflasi Daerah	2,35

NO	PROGRAM	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 28.969.875.210
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 47.280.542.558
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 886.880.220
	Total	Rp 77.137.297.988

Lumajang , November 2022

BUPATI LUMAJANG



H. THORIQUL HAQ, M.ML

SEKRETARIS DAERAH



Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004